



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PENGAWASAN

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar Isi

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4.8 Tahun 2018 Pedoman Penanganan WBS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Aplikasi Whistleblowing System di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. Nota Dinas Nomor: 506/2900/PW.01/11/2019 kepada Pusat TIK perihal Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi Whistle Blowing System



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4.8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;

23. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
24. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
25. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah

- aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
 6. Pelapor Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblower*, adalah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan/atau masyarakat.
 7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
 8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan masyarakat.

BAB II

PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pengaduan oleh pegawai atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

4

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

BAB III

PENANGANGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 4

Sekretaris Jenderal menugaskan Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

Pasal 5

Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *Whistleblower*;
- f. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

Pasal 7

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang dinyatakan lengkap dan membuat laporan paling kurang memuat:
- a. Dugaan kasus;
 - b. Unit kerja terkait;
 - c. Pokok permasalahan/ materi pengaduan;
 - d. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan berupa:
 - 1) Ditindaklanjuti melalui audit investigasi;
 - 2) Dintindaklanjuti kepada pihak yang berwenang.
- (3) Hasil pemeriksaan atas pengaduan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sejak tanggal selesainya pemeriksaan;
- (4) Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan *Whistleblowing System* untuk menindaklanjuti kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hasil pemeriksaan penanganan *Whistleblowing System* wajib disampaikan kepada *whistleblower* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

Pasal 8

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa;

- a. penyalahgunaan wewenang,
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada

A

- Baperjakat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 11

Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Whistleblower berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System* melalui aplikasi *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan;
- (3) Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terbukti tidak merahasiakan identitas pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 14

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- b. memberikan bantuan hukum;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- d. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; dan/atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 16

Dalam hal pegawai yang dilaporkan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 17

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyusun dan melaporkan penanganan pengaduan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala.
- (2) Laporan penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi dan kategori pengaduan, waktu penerimaan, status penyelesaian, hasil penanganan, serta tanggapan pengadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,




M. GUNTUR HAMZAH



Aplikasi Whistleblowing System di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Rabu, 15 April 2020 English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM Q

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI


Rabu, 26 Februari 2020 | 00:00 WIB
Nomor Perkara : 37/PUU-XVII/2019
Amar Putusan : Ditolak

Pemilihan Umum

Rabu, 26 Februari 2020 | 15:24 WIB
Nomor Perkara : 55/PUU-XVII/2019
Amar Putusan : Dalam Provisi: Menolak ...

Pemilihan Umum

Selengkapnya



ANUGERAH KONSTITUSI

BAGI GURU PKK BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL X
TAHUN 2020

Persyaratan dan Pengumuman
[Klik disini](#)

GRATIS

TAHAPAN KEGIATAN:

- Seleksi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Seleksi Tingkat Kementerian
- Penyempitan Peserta Grand Final
- Seleksi Grand Final
- Pengisian dan Penetapan HKSN Bagi Peserta
- Puncak Anugerah Konstitusi X Tahun 2020

April - Mei 2020
Juni - Juli 2020
12 Juli 2020
3 - 4 Agustus 2020
5 Agustus 2020
6 Agustus 2020

HADIAH:

- Piala dan Medali bagi Juara I, II, III, Harapan I dan Harapan II
- Sertifikat Penghargaan bagi Seluruh Grand Finalis
- Total Uang Pembinaan Ratusan Juta Rupiah


KONSULTASI PENGUMUMAN Ikuti Live Persidangan PUU Dikawal Youtube Mahkamah Konstitusi :: Informasi/Data yang tersedia di laman (w)

JADWAL SIDANG Selengkapnya >


2020 April

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10


Sidang Putusan Keduaanya L Libur



Press Release dan News Letter



Debat Konstitusi 2020



Anugerah Konstitusi 2020

BERITA**INFO PUBLIK****PUBLIKASI**


Sabtu, 11 April 2020 | 10:01 WIB
Sejken MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi
Jakarta, Humas Mkri &Ndash; Pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) Telah Menjadi Masalah

Senin, 06 April 2020 | 21:02 WIB
Hakim Konstitusi Jalani Tes Cepat Covid-19
Jakarta, Humas Mkri - Kegiatan Tes Cepat (Rapid Test) Pendeteksian Covid-19 Terhadap Wakil Ketua Mahkamah

Senin, 06 April 2020 | 14:24 WIB
MK Perkuat Pemanfaatan Teknologi Cegah Penyebaran Covid-19
Jakarta, Humas Mkri &Ndash; Sejak 17 Maret 2020 Lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) Menerapkan Sistem Bekerja

+ Berita Sidang + Berita Non Sidang


IKLAN LAYANAN MASYARAKAT




PILKADA SERENTAK
2020




PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG




Hakim Konstitusi




Putusan




Simpel.mkri.id




Case Tracking
Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI




AACC




LPSE MKRI




MAHKAMAH KONSTITUSI
JDIH




Gedung MK




Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi




Streaming dan Video Conference




2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id


TANYA JAWAB




DEWAN ETIK




HUBUNGI MK




WHISTLEBLOWING



MEDIA SOSIAL



PENGUMUNGAN




© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110, Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Whistleblowing System MKRI x +

https://wbs.mkri.id 90%



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

BerandaGara MelaporHubungi KamiGanti PasswordLoginLaporan

Selamat datang di

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan beridikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHASIKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atau kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.


Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (4W + 1H).
- Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Copyright © 2014 Mahkamah Konstitusi, SPI

28°C Hujan



ENG 15:31 17/06/2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 506/2900/PW.01/11/2019

Kepada Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Inspektur
Perihal : Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi
Whistleblowing System
Tanggal : 26 November 2019

Dengan hormat, untuk meningkatkan jaminan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi dan penyampaian pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System*. Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan evaluasi atas penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System*, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk memperbaharui aplikasi dimaksud.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*”. Atas dasar tersebut, kami mohon untuk menambahkan fitur **Identitas Pelapor** pada Aplikasi *Whistleblowing System* (yang didalamnya paling sedikit memuat nama, alamat, e-mail, dan nomor Hp/telp Pelapor (*Whistleblower*)). Hal ini bertujuan untuk memudahkan kami dalam menghubungi Pelapor (*Whistleblower*) apabila terdapat pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan permohonan penambahan fitur pada Aplikasi *Whistleblowing System* sebelumnya telah kami sampaikan melalui Nota Dinas Nomor 134/2900/PW.01/09/2018 tanggal 28 September 2018 dan Nota Dinas Nomor 289/2900/PW.01/06/2019 tanggal 11 Juni 2019. Oleh karenanya kami mohon untuk nota dinas yang kami sampaikan ini dapat diproses lebih lanjut



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Pawit Haryanto

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal MK

